

PERBANDINGAN KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN DESA PULOSARI dan DESA BATUSARI KABUPATEN PEMALANG

Bima Adi Nugraha – 14010115120040

nugrahabima69@gmail.com

Dosen Pembimbing: Drs. A. Taufiq, M.Si.

ahmadtaufiqimron@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

INTISARI

Kemiskinan dan rawan pangan merupakan masalah utama yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara-negara berkembang. Begitupula dengan Kabupaten Pemalang yang angka kemiskinannya diatas angka kemiskinan provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 17,37%. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan rawan pangan di daerah pedesaan ialah melalui program Desa Mandiri Pangan. Upaya pembangunan ketahanan pangan dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dalam keberhasilan implementasi Program Desa Mandiri Pangan dan faktor penyebab perbedaan dalam keberhasilan implementasi Program Desa Mandiri Pangan di Desa Pulosari dan Desa Batusari Kabupaten Pemalang.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini juga menggunakan landasan teori kemiskinan, kebijakan sosial, dan implementasi.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi program Desa Mandiri Pangan di Desa Pulosari sudah berjalan dengan baik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keberadaan dan keaktifan kelembagaan masyarakat yaitu adanya kelompok afinitas dan lembaga keuangan desa, sumber-sumber kebijakan yang sudah memadai, dan adanya dukungan dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Desa. Sedangkan di Desa Batusari belum berjalan dengan baik karena tidak aktifnya kelompok afinitas dan belum adanya lembaga keuangan desa, sumber kebijakan yang belum memadai seperti sumber daya manusia dan sumber dana serta sarana prasarana, dan juga tidak adanya dukungan dari Pemerintah Desa untuk mendukung keberlangsungan program Desa Mandiri Pangan.

KATA KUNCI

Kemiskinan, Rawan Pangan, Desa Mandiri Pangan, Kelompok Afinitas

Pendahuluan

Kemiskinan dan rawan pangan merupakan masalah utama yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara-negara berkembang. Kemiskinan sering dikaitkan dengan kesulitan dan kekurangan dalam memenuhi segala kebutuhan hidup, yaitu salah satunya adalah pangan.

Ironisnya pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menempati peringkat tertinggi kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebanyak 4.493.750 jiwa di bawah Jawa Timur sebanyak 4.638.530 jiwa tetapi di atas Jawa Barat 4.168.110 jiwa. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Databoks, per Maret 2017 angka kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 13,04%. Sebanyak 15 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki angka kemiskinan di atas kemiskinan provinsi, termasuk Kabupaten Pemalang yang menempati peringkat ke enam dengan tingkat kemiskinan 17,37%.

Fokus penelitian ini adalah meneliti salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah pedesaan yaitu melalui program Desa Mandiri Pangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga, sehingga dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga, yang akhirnya berdampak terhadap penurunan kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di pedesaan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Kabupaten Pemalang yang tertera dalam Perda Kabupaten Pemalang No. 23 Tahun 2008 yang tertera pada pasal 13 yaitu “Bantuan pangan bertujuan untuk meningkatkan kecukupan pangan dan status gizi serta diversifikasi pangan bagi masyarakat miskin.” Serta pasal 14 ayat 1 yang berbunyi “Memperluas kesempatan kerja dan berusaha melalui kebijakan daerah yang diarahkan pada penyempurnaan sistem penyediaan dan distribusi pangan secara merata dengan harga terjangkau.”

Desa Pulosari dan Desa Batusari memiliki persamaan dalam kaitannya dengan program Desa Mandiri Pangan. Kedua desa ini terletak di kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Pulosari yang termasuk melaksanakan program Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Pemalang sehingga memiliki mata pencaharian yang hampir sama dimana mayoritas masih bermata pencaharian di sektor pertanian dengan menjadi petani. Jarak lokasi kedua desa tersebut juga berdekatan secara geografis. Dilihat dari tahun pelaksanaan program, desa-desa tersebut sudah pada tahap yang sama pada program Desa Mandiri Pangan yaitu tahap kemandirian. Namun pada pelaksanaannya, kedua desa tersebut memiliki hasil implementasi yang berbeda. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui perbandingan keberhasilan implementasi program DMP di kedua desa tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Kemiskinan, Kebijakan Sosial dan Implementasi Kebijakan. Penjelasannya sebagai berikut:

Kemiskinan

Menurut Gunawan Sumodiningrat (1999:49) masalah kemiskinan di sektor dan pedesaan sebetulnya sudah menjadi cerita lama sejak jaman kolonial Belanda. Besarnya penduduk miskin pedesaan akibat jumlah penduduk yang semakin banyak, luas lahan semakin menyempit, dan sedikitnya peluang kerja non pertanian.

Menurut Elis dan Biggs dalam (Safaat, 2013) pembangunan pedesaan sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan yaitu dengan cara penghidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihoods*), tata kelola yang baik (*good governance*), desentralisasi, kritik terhadap partisipasi, pendekatan sektoral yang diperluas (*sector wide approach*), perlindungan sosial, dan pemusnahan kemiskinan (*poverty eradication*). Harianto (2012) untuk mewujudkan sektor pertanian dan pedesaan yang maju, modern, berdaya saing dan mampu memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya, diperlukan upaya-upaya yang terstruktur dan terukur. Berbagai upaya tersebut perlu dipetakan dalam dimensi waktu menurut

prioritas dan kepentingan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan diperlukan strategi:

- 1) Perluasan dan peningkatan infrastruktur pedesaan.
- 2) Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha di pedesaan.
- 3) Peningkatan akses masyarakat pedesaan terhadap sarana permodalan dan pemasaran.
- 4) Kebijakan yang memihak masyarakat pedesaan.
- 5) Membantu masyarakat pedesaan meningkatkan modal manusia (pengetahuan, ketrampilan, kesehatan) yang mereka miliki.

Kelemahan mendasar yang menyebabkan kemiskinan dan kegagalan dalam mewujudkan ketahanan pangan yaitu:

- 1) Pengaturan perundang-undangan ketahanan pangan masih bersifat sentralistik.
- 2) Rendahnya partisipasi masyarakat baik dalam proses perumusan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi program ketahanan pangan.
- 3) Akses masyarakat setempat dan masyarakat adat atas sumber daya alam dan sumber daya pertanian sangat terbatas bahkan diabaikan.
- 4) Ambivalensi jaminan perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat atas sumberdaya alam termasuk di dalamnya sumber daya pertanian.
- 5) Mengabaikan berbagai pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pertanian.
- 6) Degradasi atas sumber daya alam dan pertanian sebagai akibat persoalan pengurusan yang lemah (*poor governance*).

Kebijakan Sosial

Suharto (2006:61) menjelaskan bahwa, “kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan”. Dalam hal ini kebijakan sosial merupakan alat yang dapat memberikan kontribusi dalam menangani berbagai permasalahan sosial dengan terarah melalui mekanisme peraturan yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang.

Kebijakan sosial sangat berkaitan dengan masalah sosial, karena pada hakikatnya kebijakan sosial ialah sebuah respon terhadap sebuah masalah sosial yang kompleks dan memerlukan solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Menurut Jensen, secara luas masalah dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Horton dan Leslie memberikan pengertian masalah sosial sebagai suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif.

Implementasi Kebijakan

Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2002) implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti lebih tertarik untuk menganut model dan pandangan tentang implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn untuk mengetahui perbandingan keberhasilan pada suatu pelaksanaan kebijakan. Variabel-variabel tersebut dapat menjadi tolok ukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan untuk menjaga agar tidak terjadi

penyimpangan dari tujuan kebijakan. Variabel ini dapat menjadi pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Selain itu teori dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn lebih berfokus kepada kebijakan-kebijakan yang *societal driven policy* yaitu masyarakat sebagai pelaku utama aktor implementasi kebijakan program Desa Mandiri Pangan, sedangkan pemerintah sebagai pelaku pendamping. Disini termasuk kegiatan implementasi Program Desa Mandiri Pangan yang dilakukan oleh masyarakat, yang mendapat subsidi atau bantuan dari pemerintah. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang memengaruhi kebijakan publik adalah variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi dan disposisi implementator.

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang mencoba menggambarkan kondisi riil yang terjadi di lapangan serta melakukan analisis secara cermat dalam mengamati setiap fenomena yang dijumpai serta ingin menekankan makna yang lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif deskriptif peneliti memfokuskan dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk mengarahkan pada ketercapaian pengumpulan data secara langsung.

Perbedaan Keberhasilan Implementasi Program Desa Mandiri Pangan Desa Pulosari dan Desa Batusari

Penelitian ini diamati melalui fenomena yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi, serta Disposisi Implementator.

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Untuk menentukan standar dan sasaran kebijakan dapat menggunakan pernyataan dari pembuat keputusan yang dituangkan dalam bentuk dokumen, seperti regulasi dan pedoman pelaksanaan program yang mengandung kriteria untuk evaluasi kinerja kebijakan. (Winarno, 2002: 159-160). Indikator keberhasilan program Desa Mandiri Pangan sebagai berikut:

a. Terbentuknya dan Keaktifan Kelembagaan Masyarakat (Kelompok Afinitas dan Lembaga Keuangan Desa)

KA adalah kelompok yang tumbuh atas dasar ikatan kebersamaan dan kecocokan antar anggota yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan memperhatikan sosial budaya setempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama-sama. Desa Pulosari memiliki 2 kelompok afinitas DMP yaitu KA Ngudi Rahayu dan KA Margi Lestari. Tahap awal program DMP berupa sosialisasi kegiatan dari Dinas Pertanian di Desa Pulosari yaitu sekitar dua tahun dari 2014 sampai 2015, hingga akhirnya kelompok afinitas mulai aktif berkegiatan pada tahun 2015. KA Ngudi Rahayu diberikan bantuan hewan ternak kambing oleh pemerintah menggunakan APBD I Provinsi sebanyak 30 ekor, 27 ekor betina dan 3 ekor jantan. KA Ngudi Rahayu sekarang juga sudah menambah usaha lain di bidang budidaya nanas. Pemeliharaan atau ternak kambing di kelompok ini meliputi perawatan kandang kambing, pemilihan pakan kambing, hingga pemanfaatan kotoran kambing berupa pupuk. KA Margi Lestari terletak di Dukuh Krajan mulai aktif juga pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2015. KA Margi Lestari mendapatkan 30 ekor kambing dan sudah memiliki 25 anggota aktif.

Di Desa Pulosari juga sudah terdapat LKD untuk efektivitas pengelolaan modal kelompok. LKD ditumbuhkan oleh perwakilan kelompok-kelompok afinitas yang berfungsi untuk mengelola dana Bansos, simpanan tabungan masyarakat, dan layanan permodalan kepada RTM khususnya dan masyarakat desa umumnya untuk pengembangan usaha produktif. LKD di Desa Pulosari adalah BUMDes Argo Sari yang lahir melalui Musdes. PemDes Pulosari pada tahun 2017 mengeluarkan Dana Desa sebesar Rp 30.000.000,- untuk pembiayaan BUMDes Argosari.

Desa Batusari terdapat 4 kelompok afinitas Desa Mandiri Pangan yaitu KA Maju Makmur, KA Suka Maju, KA Mandiri Jaya, dan KA Mekar Jaya. Tahap awal program Desa Mandiri Pangan berupa sosialisasi kegiatan dari Dinas Pertanian di Desa Batusari yaitu sekitar dua tahun dari 2009 sampai 2011, hingga akhirnya kelompok afinitas mulai aktif berkegiatan pada tahun 2011. Sekitar tahun 2011 KA diberikan modal dari pemerintah menggunakan dana APBN yang digunakan untuk

pertanian dan beternak, terutama untuk budidaya tanaman lombok. Semua KA di Desa Batusari selain beternak kambing, juga menanam tanaman hortikultura yaitu lombok dan kubis. Hal ini dikarenakan lokasi Desa Batusari yang berada di lereng Gunung Slamet dan hanya berjarak kurang lebih 3km dari gunung yang menyebabkan kelompok memiliki keberagaman jenis tanaman yang tinggi.

KA di Desa Batusari sudah tidak aktif secara kelembagaan. KA Mandiri Jaya sempat terpilih oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya untuk studi banding di Temanggung dan Magelang mengikuti pelatihan tentang pertanian. Faktor cuaca yang menyebabkan gagal panen dan juga kemauan anggota kelompok untuk mendapatkan keuntungan secara instan dan cepat. LKD di Desa Batusari sudah terbentuk sejak 2015 yang tugasnya mengelola uang. LKD ini hanya bertahan satu tahun sampai tahun 2016, karena pada saat krisis ekonomi banyak anggota KA yang tidak mengembalikan pinjamannya.

b. Terselenggaranya Lokasi Kawasan Mandiri Pangan

Lokasi Kawasan Mandiri Pangan dalam upaya untuk peningkatan produksi pangan, serta pengembangan usaha agar memberikan pendapatan layak hanya terdapat di Desa Pulosari. Integrasi kegiatan lintas sektor terkait untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan yang berguna untuk masyarakat, seperti adanya lumbung pangan desa, adanya pasar desa, serta adanya kelompok-kelompok tani. Desa Batusari tidak ada integrasi kegiatan lintas sektor dan pengembangan usaha lain. Program Kebun Gizi sudah tidak aktif dan tidak adanya pemanfaatan potensi sumber daya alam di daerah ini.

c. Terselenggaranya Pelatihan dan Pendampingan Kepada Masyarakat

Dinas Pertanian sudah melakukan sosialisasi dan pendampingan di Desa Pulosari dan Desa Batusari. Dan hanya Desa Pulosari yang telah melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat yang dilakukan oleh PemDes Pulosari. Desa Pulosari memiliki P4S Bheger untuk pelatihan pertanian. Desa Batusari tidak ada pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dari PemDes. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari tidak adanya inovasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat tentang program DMP.

2) Sumber-Sumber Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn sumber-sumber kebijakan yang dimaksud adalah sumber dana atau intensif lainnya yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan. (Winarno, 2002: 161) pemenuhan syarat variabel sumber-sumber kebijakan memiliki perbedaan antara Desa Pulosari dan Desa Batusari. Desa Pulosari telah memenuhi sumber-sumber kebijakan yaitu sumber dana yang memadai dengan adanya dana untuk pembiayaan BUMDes Argosari, peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat, serta adanya penambahan modal untuk lumbung desa. SDM yang kompeten, dan fasilitas yang memadai seperti Pasar Desa sehingga mendorong kelancaran pelaksanaan program. Desa Batusari belum memenuhi sumber-sumber kebijakan yang menunjang keberhasilan implementasi. Tidak terpenuhinya sumber dana yang merupakan perangsang untuk kelancaran kegiatan. SDM yang dimiliki sudah mencukupi. Sarana prasarana yang minim juga menghambat pelaksanaan program DMP. Belum terpenuhinya sumber-sumber kebijakan di Desa Batusari menjadi penghambat dalam kelancaran program DMP.

3) Komunikasi Antar Organisasi

Sosialisasi terhadap pelaksana program sudah dilakukan dengan baik di kedua desa, yaitu Desa Pulosari dan Desa Batusari. Komunikasi antara KA di Desa Pulosari dengan koordinator pendamping sudah baik. Koordinasi antara KA Desa Pulosari dengan Kepala Desa sudah berjalan dengan baik, meliputi kegiatan rapat rutin yang melibatkan Kepala Desa, sinergitas Kepala Desa dengan tokoh masyarakat, diskusi secara informal, dan juga menjadi penghubung antara KA dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pematang Jaya. Desa Batusari, KA sampai sekarang menjalankan program sendiri tanpa adanya koordinasi dengan PemDes serta tidak ada komunikasi sehingga menghambat pelaksanaan program.

4) Karakteristik Badan Pelaksana

Yaitu mencakup pada struktur birokrasi, nilai-nilai, dan pola-pola hubungan dan komunikasi yang terjadi didalam birokrasi pelaksana yang memengaruhi implementasi kebijakan. (Subarsono, 2013:110). Di dalam program DMP ialah menggunakan Rencana Usaha Kelompok di KA.

RUK adalah rincian usulan kegiatan kelompok yang berisi komponen bahan atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok. Isi dari RUK adalah perencanaan pengembangan usaha produktif, pemanfaatan dana bantuan pemerintah, serta membuat pembukuan dan pelaporan secara tertib dan periodik. KA DMP di Desa Pulosari sudah melakukan tugasnya dengan baik yaitu memiliki RUK yang berisi mengenai perencanaan pengembangan usaha produktif, pemanfaatan dana bantuan pemerintah, serta membuat pembukuan dan pelaporan secara tertib dan periodik. KA di Desa Batusari tidak ada RUK yang menyebabkan tidak ada rencana kelompok untuk jangka panjang.

5) Perbedaan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa yang dimaksud adalah kondisi sosial ekonomi yang berhubungan dengan kondisi kemiskinan dan rawan pangan. Kondisi sosial ekonomi Desa Pulosari dilihat dari produktifnya masyarakat dalam meningkatkan komoditas pangan dan banyaknya masyarakat yang membentuk kelompok-kelompok usaha produktif. Dampak dari program juga dapat dirasakan dengan turunnya angka rawan pangan naiknya derajat perekonomian masyarakat. Di Desa Batusari kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan rawan pangan dan kemiskinan menunjukkan masih rendahnya inovasi dan produksi pangan di masyarakat. Selain itu krisis air bersih di Desa Batusari juga menjadi masalah sosial di Desa Batusari yang menyebabkan rawan pangan.

Kondisi politik, PemDes Pulosari telah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan program DMP dengan adanya alokasi anggaran desa. Gaya kepemimpinan Kades Pulosari juga memberikan dampak yang besar untuk ketahanan pangan dengan banyaknya penghargaan dan prestasi dalam bidang ketahanan pangan. Di Desa Batusari tidak ada alokasi anggaran untuk mendukung program dan tidak ada koordinasi dengan KA Prioritas pembangunan PemDes Batusari lebih berfokus pada menangani krisis air bersih yang menjadi masalah terus menerus setiap tahun.

6) Disposisi Implementator

Pemahaman dari pelaksana di Desa Pulosari sudah baik dikarenakan adanya penyuluhan dari Dinas Pertanian serta tidak terlepas dari adanya RUK di dalam KA sehingga memudahkan anggota kelompok untuk mengetahui tujuan dan program DMP serta peran dari anggota KA. Di Desa Batusari, implementator juga sudah mengetahui pemahaman tentang program DMP. Implementator program Desa Mandiri Pangan di Desa Pulosari menerima dengan baik tujuan-tujuan program. Para implementator mendukung kelangsungan program Desa Mandiri Pangan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemauan implementator program DMP di Desa Batusari dalam melaksanakan program kurang baik. Kelompok afinitas berjalan sesuai dengan tujuan program hanya pada tahun-tahun awal program.

Faktor Penyebab Perbedaan dalam Keberhasilan Implementasi Program Desa Mandiri Pangan Desa Pulosari dan Desa Batusari

Keberadaan dan keaktifan kelembagaan masyarakat. Di Desa Pulosari terdapat 2 KA yang aktif dan memiliki usaha produktif lain. KA juga sudah memiliki RUK yang memudahkan dalam menjalankan program DMP. LKD yaitu BUMDes Argosari juga berperan penting untuk mengelola dana Bansos, simpanan modal/tabungan masyarakat, dan layanan permodalan kepada RTM khususnya dan masyarakat desa umumnya untuk pengembangan usaha produktif. Di Desa Batusari, tidak aktifnya KA dan belum adanya LKD memengaruhi kurang optimalnya program DMP di Desa Batusari.

Dukungan dari PemDes dan masyarakat Desa Pulosari berupa adanya alokasi anggaran yang besar untuk mendukung kelancaran program. Sedangkan dukungan dari masyarakat dapat dilihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan dilihat dari produktifnya masyarakat dalam meningkatkan komoditas pangan serta banyak masyarakat yang membentuk kelompok-kelompok usaha produktif. Swadaya masyarakat juga sangat mendukung dengan adanya bantuan dana dari masyarakat untuk membangun sarana prasarana yang memengaruhi keberhasilan program. Di Desa Batusari, belum

tersedianya dana untuk pelaksanaan program DMP dari Alokasi Dana Desa maupun dari swadaya masyarakat.

Koordinasi antara KA dengan Kepala Desa Pulosari dilaksanakan dengan baik. Koordinasi tersebut dapat dilihat dari seringnya Kades mengikuti rapat rutin yang dilakukan oleh KA, sinergitas Kades dengan tokoh masyarakat yang tergabung dalam kelompok, diskusi secara informal dengan kelompok, dan juga menjadi penghubung atau komunikator antara KA di Desa Pulosari dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang. Di Desa Batursari belum melakukan koordinasi secara optimal antara Kepala Desa dengan KA.

Desa Berdikari, Rawan Pangan Teratasi

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Desa Pulosari sudah memenuhi enam variabel di dalam implementasi program DMP. Desa Pulosari telah memenuhi indikator program yang menunjukkan standar dan sasaran program telah direalisasikan, sumber daya yang ada sudah mencukupi dengan adanya pendanaan dan sarana prasarana yang mendukung implementasi program, serta SDM yang mencukupi dari kuantitas maupun kualitas sehingga mendorong kelancaran program. Komunikasi yang dilakukan kelompok afinitas dengan koordinator pendamping dan kelompok afinitas dengan kepala desa sudah berjalan dengan baik sehingga memperlancar jalannya program. Adanya RUK didalam organisasi pelaksana yaitu kelompok afinitas mendukung dalam keberhasilan program. Kondisi lingkungan kebijakan yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi program DMP mendukung keberhasilannya dengan adanya dukungan dari masyarakat serta pemerintah desa. Implementator DMP sudah memahami tujuan program dan merespon dengan baik sehingga menimbulkan dukungan untuk kelangsungan implementasi program.

Desa Batursari belum sepenuhnya memenuhi indikator keberhasilan program Desa Mandiri Pangan. Variabel yang memenuhi adalah sumber kebijakan berupa sumber daya manusia, kelompok afinitas memiliki kualitas yang memadai dalam usaha produktif tanaman hortikultura karena memang kondisi desa yang sangat cocok untuk budidaya lombok. Serta disposisi implementator yaitu pemahaman implementator terhadap program Desa Mandiri Pangan yang sudah mengetahui tujuan program. Desa Batursari sempat berhasil dalam program Desa Mandiri Pangan pada tahun awal-awal program dengan memiliki banyak keuntungan dari penanaman hortikultura dan pemeliharaan bantuan hewan ternak kambing. Keberhasilan Desa Batursari pada tahun awal-awal program meliputi indikator standar dan sasaran kebijakan, sarana prasarana, serta komunikasi antara kelompok afinitas dan Kepala Desa. Namun Desa Batursari belum memenuhi variabel lain seperti standar dan sasaran program yang tidak sepenuhnya direalisasikan, sumber dana belum dicapai dan tidak adanya pendanaan dan sarana prasarana yang mendukung implementasi program serta komunikasi yang dilakukan kelompok afinitas dengan kepala desa belum berjalan sepenuhnya.

Terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti mengenai implementasi program Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Pemalang bersumber dari temuan-temuan peneliti selama melakukan penelitian. Saran yang diajukan oleh peneliti yaitu: Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang harus rutin untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keaktifan KA DMP, khususnya kepada desa yang sudah pada tahap kemandirian. Selain itu, dalam rangka penyusunan RUK, Dinas Pertanian harus lebih rutin memberikan pelatihan kepada kelompok afinitas khususnya pelatihan administrasi. Untuk meningkatkan keberhasilan program DMP di Desa Pulosari, diperlukan adanya penguatan kelembagaan dari kelompok afinitas agar tidak mudah berpuas diri sehingga kelompok afinitas dapat lebih menjadi sumber daya unggul dan usaha produktif kelompok afinitas dapat menjadi komoditas utama dalam upaya swasembada pangan. Di Desa Batursari, perlu adanya penguatan organisasi. Ketua KA harus merangkul dan mengajak anggotanya untuk bisa lebih menyatu dalam meningkatkan rasa kekeluargaan antar anggota maupun dalam mendukung kegiatan yang telah direncanakan di dalam tujuan program DMP. Perlu adanya motivasi yang dilakukan secara rutin oleh Ketua KA maupun koordinator pendamping dengan memberikan arahan pada anggota agar pola pikir mereka mampu berkembang. Harus adanya dukungan dari pihak PemDes melalui koordinasi dan komunikasi yang baik antara KA dengan pemerintah seperti sikap peduli dan berusaha untuk mewujudkan

keinginan kelompok afinitas dengan memberikan alokasi anggaran untuk menunjang implementasi program DMP.

Ucapan Terima Kasih

Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Kemiskinan: Teori, Fakta, dan Kebijakan. Jakarta: IMPAC
- Safaat, Rachmad. 2013. Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan. Malang: UB Press
- Suharto, Edi. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo.
- Hariato. 2012. Peranan Pertanian Dalam Ekonomi Perdesaan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol.10 No.2 (Hal. 159)
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, *Petunjuk Pelaksanaan Desa Mandiri Pangan*, (Jakarta:Badan Ketahanan Pangan, 2014)
- Pemerintah Kabupaten Pemalang, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, Profil Pembina Ketahanan Pangan Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang tahun 2017

Daftar Narasumber

- Retno Widyaharti, S.P, MM, Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- Teguh Setyo Widodo, Kepala Desa Pulosari
- Tamat, Kepala Desa Batusari
- Heru, Kelompok Afinitas DMP Margi Lestari
- Sukamto, Kelompok Afinitas DMP Mandiri Jaya

Tentang Penulis

Bima Adi Nugraha adalah Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.